Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi **e-ISSN**: 2549-4236, **p-ISSN**: 1411-8939
Lembaga Penellitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Vol 23, No 3 (2023): Oktober, 3433-3440
DOI: 10.33087/jiubj.v23i3.4368

Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau: Pendekatan Spasial

Tata Surya*, Fery Andrianus, Neng Kamarni
Universitas Andalas
*Correspondence: surya07909@gmail.com

Abstrak. Determinan tradisional pengeluaran pemerintah antara lain berasal dari pendapatan, hibah, faktor demografis dan politik. Namun kebijakan pengeluaran pemerintah juga dapat dipengaruhi oleh kebijakan pengeluaran pemerintah tetangganya. Penelitian ini menggunakan ekonometrika spasial *Spatial Autoregressive (SAR)* untuk melihat adanya interaksi strategis pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau periode tahun 2011-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat interaksi strategis dalam Pengeluaran Pemerintah.

Kata kunci : desentralisasi fiskal, interaksi strategis, pengeluaran pemerintah daerah, Provinsi Riau, panel spasial.

Abstract. *Traditional determinants of government spending include income, grants, demographic and political factors. But a government's spending policy can also be influenced by its neighboring governments' spending policies. This study uses Spatial Autoregressive (SAR) spatial econometrics to observe the existence of strategic interactions in District/City Government spending in the Riau Province for the 2011-2019 period. The research results show that there is a strategic interaction in government spending.*

Keywords **:** *fiscal decentralization, strategic interaction, local government expenditure, Riau Province, spatial panel.*

PENDAHULUAN

Pengeluaran pemerintah secara umum dipengaruhi oleh pendapatan, hibah dari pemerintahan lain, karakteristik demografis dan/atau politik (Case et al., 1993). Ketika tanggung jawab pengeluaran pemerintah daerah telah didesentralisasikan, sulit untuk menyatakan bahwa pemerintah daerah membuat keputusan secara terpisah (López et al., 2017). Sehingga keputusan pengeluaran tidak hanya bergantung pada determinan pengeluaran tradisional tersebut, tetapi juga pada keputusan pengeluaran tetangga (Ferraresi et al., 2018). Efek yang dihasilkan dapat positif atau negatif, yang mencerminkan kompetisi antar pemerintah dan peniruan atau koordinasi perilaku dalam keputusan fiskal pemerintah (Sofi & Sasidharan, 2018). Pengeluaran pemerintah daerah yang saling mempengaruhi adalah masalah utama ketika mencoba memahami distribusi pengeluaran antar kotamadya dan dampak dari kebijakan desentralisasi anggaran (Costa et al., 2015).

Konsep interaksi strategis antara pemerintah dalam keputusan pengeluaran publik telah menarik perhatian yang cukup besar dalam literatur ekonomi publik terapan (Costa et al., 2015; Le Gallo & Ndiaye, 2021; Sofi & Sasidharan, 2018). Secara umum konsep teoritis mengenai interaksi strategis terbagi menjadi dua kategori, yaitu *spillover model* (model limpahan) dan *resource-flow model* (model aliran sumber daya) (Brueckner, 2003). Penelitian *spillover model*, yang merupakan fokus dalam penelitian ini, adalah penelitian yang menyelidiki apakah pengeluaran publik dari suatu yurisdiksi menghasilkan efek menguntungkan atau negatif, menyebar melintasi batas-batasnya dan mempengaruhi kesejahteraan penduduk di yurisdiksi tetangga. Penelitian *spillover* menilai apakah keputusan pemerintah daerah bergantung pada kebijakan yang dipilih di tempat lain. Jika pengeluaran diperuntukkan bagi barang publik lokal yang saling melengkapi (seperti jasa lingkungan atau infrastruktur dan pembangunan jalan), pengeluaran di yurisdiksi tetangga kemungkinan akan meningkatkan pengeluaran pemerintah daerah sendiri. Namun, jika barang publik lokal merupakan barang yang dapat disubstitusikan (seperti fasilitas olahraga, rekreasi dan sekolah), kebalikannya dapat terjadi (Costa et al., 2015).

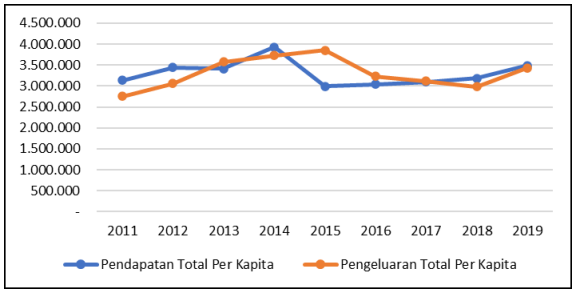
Penelitian *spillover model* pertama kali dilakukan pada lingkup negara-negara bagian di

Amerika Serikat. Penelitian menemukan faktor penentu penting lain dari pengeluaran pemerintah di Amerika Serikat, yaitu pengeluaran pemerintah tetangga (Case et al., 1993). Menurut mereka, warga negara dan pegawai negeri kemungkinan besar akan terpengaruh oleh tindakan negara-negara tetangga, yaitu dengan cara memiliki informasi yang berkaitan dengan kegiatan pemerintah di negara-negara tetangga, dan kemudian menggunakan informasi ini untuk memilih apa yang mereka inginkan dan diterapkan oleh pemerintah negara bagian mereka sendiri.

Penelitian-penelitian untuk menguji keberadaan interaksi strategis pengeluaran pemerintah juga telah dilakukan di Indonesia. Salah satu faktor yang mendasari penelitian-penelitian tersebut yaitu adanya kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kebijakan tersebut memberikan lingkungan yang tepat untuk menguji kompetisi antar pemerintah daerah (Husna & Yudhistira, 2017). Kompetisi pemerintah daerah ini dapat terjadi dikarenakan desentralisasi fiskal di Indonesia merupakan desentralisasi dalam bentuk pengeluaran anggaran (Granado et al., 2008). Desentralisasi mengubah pengambilan keputusan daerah dengan membatasi fungsi pemerintah pusat dan memperluas kewenangan pemerintah daerah dalam menyediakan barang publik daerah (Siburian, 2022).

Penelitian-penelitian tentang interaksi pengeluaran publik di negara berkembang menemukan adanya kompetisi tolok ukur (*yardstick competition*) dan efek limpahan pengeluaran (*expenditure spillover*) pemerintah daerah di Indonesia (lihat Granado et al., 2008 dan Husna & Yudhistira, 2017). Penelitian-penelitian selanjutnya juga mengarah pada tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota dalam lingkup provinsi (lihat Maulana & Kurnia, 2014).

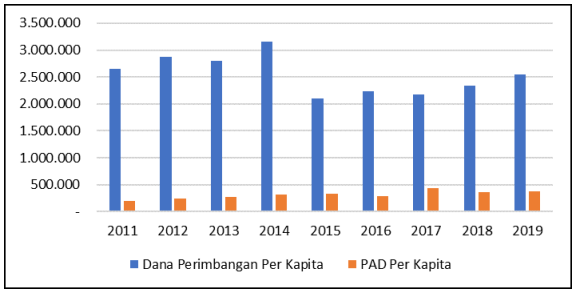
Data DJPK Kementerian Keuangan menunjukkan rata-rata pengeluaran/belanja Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau selama periode tahun 2011 hingga 2019 adalah sebesar Rp20,98 triliun/tahun atau dalam satuan kapita sebesar Rp3,30 juta/tahun. Realisasi pengeluaran cenderung mengalami peningkatan hingga tahun 2015, kemudian mengalami penurunan setelahnya. Disamping itu, permasalahan rendahnya penyerapan anggaran terjadi pada tahun 2011, 2012 dan 2014 (Isyandi & Trihatmoko, 2022). Namun setelah defisit yang tinggi di tahun 2015, struktur penerimaan dan pengeluaran dalam APBD Pemerintah Kabupaten/Kota relatif seimbang.



Sumber: data olahan

Gambar 1
Realisasi Pendapatan Per Kapita dan Pengeluaran Per Kapita Pemerintah Kabupaten/Kota

Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber utama pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota. Rata-rata Dana Perimbangan adalah sebesar Rp16,06 triliun/tahun atau dalam satuan kapita sebesar Rp2,54 juta/tahun. Sedangkan besaran rata-rata PAD yaitu Rp2,02 triliun atau dalam satuan kapita sebesar Rp314,97 ribu/tahun. Dana Perimbangan mengambil porsi pendapatan terbesar yaitu 76,69% dari total pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota, disusul dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu sebesar 9,66%. Meski demikian, porsi Dana Perimbangan terhadap pendapatan daerah mengalami fluktuasi setiap tahunnya dan mencapai titik terendah pada tahun 2015. Sebaliknya, PAD Pemerintah Kabupaten/Kota relatif stabil dan tumbuh sampai dengan akhir periode tahun 2019.



Sumber: data olahan

Gambar 2
Realisasi PAD Per Kapita dan Dana Perimbangan Per Kapita Pemerintah Kabupaten/Kota

Indikator PDRB dan PDRB Per kapita merupakan indikator makro yang dapat membedakan satu daerah dengan daerah lainnya. Nilai PDRB merupakan nilai produksi barang dan jasa di suatu daerah, sedangkan PDRB per kapita merupakan salah satu indikator pembanding kemakmuran ekonomi antar daerah (Kamarni et al., 2022; Sjafrizal, 2017). Semakin tinggi PDRB per kapita maka diasumsikan semakin tinggi pula tingkat pendapatan penduduk, dan begitu pula sebaliknya (Rifa'i & Moddilani, 2021). Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi yang memiliki indikator perekonomian yang baik. Perekonomian Provinsi Riau sebagian besar didukung oleh kekayaan sumber daya alam, diantaranya minyak bumi dan kelapa sawit. Data BPS periode tahun 2011-2019 menunjukkan Provinsi Riau memiliki nilai PDRB ADHB rata-rata sebesar Rp653,63 triliun (tertinggi ke lima secara nasional sekaligus tertinggi di Sumatera) dan PDRB per kapita ADHB rata-rata sebesar Rp102,83 juta (tertinggi ke empat secara nasional sekaligus tertinggi di Sumatera).

Provinsi Riau pada tahun 2019 menyumbang 4,74% nilai PDRB nasional (tertinggi ke enam secara nasional dan tertinggi kedua di Sumatera setelah Provinsi Sumatera Utara). Posisi Provinsi Riau secara nasional tersebut memperlihatkan pengelolaan perekonomian di Provinsi Riau telah berjalan dengan baik. Namun dilihat dari pertumbuhan ekonominya, Provinsi Riau merupakan provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi terendah dibandingkan provinsi lain di Sumatera. Hal ini disebabkan sektor utama perekonomian yaitu pertambangan minyak dan kelapa sawit sangat dipengaruhi oleh harga minyak dunia yang cenderung mengalami penurunan (DJPB, 2019). Uraian mengenai kinerja pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota dan indikator makro diatas sekiranya menyiratkan pertanyaan yang memerlukan analisis lebih lanjut, khususnya tentang pengaruhnya terhadap pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota, dan yang tidak kalah penting yaitu apakah interaksi strategis juga terjadi pada pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

METODE

Kumpulan data penelitian ini bersumber dari data yang dipublikasikan oleh website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau periode tahun 2011-2019. Data dari DJPK Kementerian Keuangan terdiri dari Laporan dan Realisasi Anggaran APBD. Selanjutnya data dari BPS Pusat dan BPS Provinsi Riau terdiri dari data kependudukan dan output perekonomian daerah pada 12 Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

Model spasial dibentuk dari model regresi linier dengan menambahkan pengaruh interaksi spasial ke dalam model (Firdaus et al., 2021). Bentuk interaksi ini terdiri dari tiga jenis yaitu interaksi endogen antar variabel dependen (*Y*), efek interaksi antar variabel bebas (*X*) dan efek interaksi antar komponen *error* (ε). Model lengkap dengan semua jenis efek interaksi mengambil bentuk sebagai berikut (Elhorst, 2014):

$$Y = \delta WY + \alpha\iota N + X\beta + WX\theta + u$$
$$u = \lambda Wu + \varepsilon$$

dimana WY menunjukkan efek interaksi endogen antara variabel dependen, WX efek interaksi eksogen antara variabel independen, dan Wu efek interaksi antara istilah gangguan unit yang berbeda. Model persamaan diatas dikenal sebagai model General Nesting Spatial (GNS) yang terdiri dari semua jenis efek interaksi. δ disebut koefisien autoregresif spasial, λ koefisien autokorelasi spasial, sedangkan θ, seperti β, mewakili vektor K x 1 dari parameter tetap tetapi tidak diketahui untuk diestimasi. W adalah matriks N x N non-negatif yang menggambarkan konfigurasi spasial atau susunan unit-unit dalam sampel.

Penelitian ini menggunakan dua model regresi panel spasial, yaitu *Spatial Auto Regressive* (*SAR*) dan *Spatial Error Model* (*SEM*). Pemilihan model terbaik diantara kedua model tersebut ditentukan dari besarnya nilai koefisien *Loglikelihood*. Model *SAR* (Elhorst, 2014) yaitu:

$$y_{it} = \delta \Sigma_{j=1}^{n} w_{ij} y_{jt} + x_{it}\beta + \mu_i + \varepsilon_{it}$$

Dimana wij merupakan elemen dari matriks pembobot spasial W. Sementara model SEM yaitu:

$$y_{it} = x_{it}\beta + \mu_i + u_{it}$$
$$u_{it} = \lambda \Sigma_{j=1}^{n} w_{ij} u_{it} + \varepsilon_{it}$$

Matriks pembobot spasial merupakan matriks khusus yang menggambarkan hubungan ketetanggaan (neighborhood) atau region berdasarkan jarak. Adapun metode matriks pembobot spasial yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Queen Contiguity (Persinggungan Sisi-Sudut). Metode Queen Contiguity (Persinggungan Sisi-Sudut)

memberikan nilai persinggungan dengan bobot ij = 1 untuk entitas yang bersisian (common side) atau titik sudutnya (common vertex) bertemu dengan region yang menjadi perhatian, dan sebaliknya memberikan bobot ij = 0 untuk region lain (Lesage, 1999).

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini mengadaptasi variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian di lingkup Indonesia (lihat Granado et al., (2008); Sasana, (2011); Maulana & Kurnia (2014); Husna & Yudhistira (2017)). Variabel penelitian diolah menggunakan model ekonometrika spasial yang tersedia dalam aplikasi olah data *R Studio.* Berikut definisi operasional dari masing-masing variabel dependen dan variabel independen:

1. Variabel Dependen:
   - Pengeluaran Total Per Kapita. Pengeluaran Total Per Kapita (*Totalkap*) yaitu total realisasi pengeluaran atau belanja APBD Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yang diukur dalam nilai Rupiah.
2. Variabel Independen:
   - Jumlah Penduduk (*Penduduk*). Variabel jumlah penduduk yaitu ukuran absolut dari penduduk yang diukur dalam ribu jiwa dan ditranformasi menjadi nilai *Logaritma Natural* (*LN*).
   - Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita (*PDRBkap*). Variabel PDRB yaitu nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu Kabupaten/Kota dalam satu tahun yang diukur dalam nilai Rupiah dibagi dengan jumlah penduduk Kabupaten/Kota tersebut. Adapun variabel PDRB yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB Atas Dasar Harga Berlaku per kapita yang kemudian ditranformasi menjadi nilai *Logaritma Natural* (*LN*).
   - Pendapatan Asli Daerah Per Kapita (*PADkap*). Variabel Pendapatan Asli Daerah Per Kapita (PADkap) yaitu jumlah Pendapatan Asli Daerah dibagi jumlah penduduk di suatu Kabupaten/Kota. *PADkap* diukur dalam Rupiah dan ditransformasi menjadi *Logaritma Natural* (*LN*).
   - Dana Perimbangan Per Kapita (*Fundkap*). Variabel Dana Perimbangan Per Kapita (Fundkap) yaitu jumlah total Dana Perimbangan yang diterima suatu Kabupaten/Kota dibagi dengan jumlah penduduk di Kabupaten/Kota tersebut. Fundkap diukur dalam Rupiah dan ditransformasi menjadi *Logaritma Natural* (*LN*).

HASIL

Tabel 1
Model Regresi Panel

	FEM	***REM***
Intercept		5,372569 ***
		(1,214393)
Penduduk	-0,614808 *	-0,195681 ***
	(0,262829)	(0,055577)
PDRBkap	0,325982 *	0,180871 **
	(0,154172)	(0,065640)
PADkap	0,210915 **	0,110087 ***
	(0,066778)	(0,033273)
Fundkap	0,284120 **	0,509968 ***
	(0,097506)	(0,079152)
N	108	108
F-Statistic; p-value	16,6172; 0,00	
Chisq; p-value		739,94; 0,00
R-Squared	0,41944	0,87781
Adj. R-Squared	0,32479	0,87306

Keterangan: Nilai dalam () = *std. error*; Tanda '***', '**', '*', dan '.' signifikansi pada *alpha* 0,1%, 1%, 5%, dan 10%.
Sumber: data olahan

Tabel 1 menjelaskan hasil pengujian menggunakan *Hausmant Test* menunjukkan bahwa model FEM merupakan model regresi panel terbaik.

Tabel 2
Hasil *Hausman Test* Model Regresi Panel

Test	*chisq*	*p-value*	Keterangan
Hausmant Test	35,224	0,00	*p-value* signifikan dibawah α = 5%, Model terpilih yaitu FEM

Sumber: data olahan

Hasil pengujian asumsi klasik menunjukkan: hasil uji heteroskedastisitas menggunakan *Breusch-Pagan Test* memberikan hasil *p-value* sebesar 0,09128, sehingga diperoleh kesimpulan tidak terjadi heteroskedastisitas, begitu juga hasil uji autokorelasi residual menggunakan Durbin Watson Test menghasilkan nilai *p-value* = 0,07086, sehingga diperoleh kesimpulan tidak terdapat autokorelasi residual pada model. Tabel 3 menjelaskan *Breusch-Pagan LM test* dan *Pesaran CD test* digunakan untuk mendeteksi adanya ketergantungan spasial dalam suatu model regresi. Kedua uji menghasilkan nilai *p-value* yang signifikan dibawah α = 5% yang menunjukkan model data panel memiliki ketergantungan spasial dan dapat dilanjutkan ke model regresi spasial.

Tabel 3
Hasil *Breusch-Pagan Test,* dan *Durbin Watson*

Test	Nilai	*p-value*
Breusch-Pagan LM test (Chisq)	189,21	0,00
Pesaran CD test (z)	12,279	0,00

Sumber: data olahan

Tabel 4.
Hasil Uji Dependensi Spasial

Test	Nilai	*p-value*
Breusch-Pagan LM test (Chisq)	189,21	0,00
Pesaran CD test (z)	12,279	0,00

Sumber: data olahan

Tahapan selanjutnya yaitu pemilihan model spasial yang terbaik dilakukan dengan membentuk dua model spasial yaitu *Spatial Autoregressive Model* (*SAR*) dan *Spatial Error Model* (*SEM*). Pengujian *Hausman Test* pada Tabel 5 menjelaskan model spasial dilakukan untuk memperoleh hasil terbaik dari model *SAR* dan *SEM*. *Hausman Test* menunjukkan model terbaik *SAR* yaitu *SAR-FEM* dan model terbaik *SEM* yaitu *SEM-FEM*.

Tabel 5
Model Regresi Panel Spasial

Variabel Dependen (Y): Pengeluaran Total Per Kapita

	SAR		*SEM*	
	SAR-FEM	*SAR-REM*	*SEM-FEM*	*SEM-REM*
λ	0,427544 ***	0,376320 ***		
	(0,078397)	(0,074046)		
ρ			0,588045 ***	6,3383e-01 ***
			(0,077307)	(6,3774e-02)
Intercept		0,775420		2,690612 **
		(1,488161)		(0,944039)
Penduduk	-0,671686 **	-0,253663 ***	-0,532307 *	-0,059376
	(0,206563)	(0,068177)	(0,237264)	(0,044147)
PDRBkap	0,334585 **	0,300026 ***	0,100708	0,014942
	(0,122076)	(0,075124)	(0,107896)	(0,050065)
PADkap	0,190256 ***	0,111510 **	0,244000 ***	0,133589 ***
	(0,053502)	(0,038402)	(0,055228)	(0,024874)
Fundkap	0,235768 **	0,338689 ***	0,504822 ***	0,757402 ***
	(0,081976)	(0,074886)	(0,107849)	(0,066755)

Ket: *lambda* (*λ*) = *spatial autoregressive coefficient, rho* (*ρ*) = *spatial error parameter;* Nilai dalam () = *std. error;* Tanda "***", "**", "*", dan "." signifikansi pada *alpha* 0,1%, 1%, 5% dan 10%

Sumber: data olahan

Tabel 6
Hasil *Hausman Test for Spatial Models*

Test	*chisq*	*p-value*	Keterangan
Hausmant Test for Spatial Models - SAR	80,734	0,00	*p-value* signifikan dibawah α = 5%, Model terpilih yaitu SAR-FEM
Hausmant Test for Spatial Models - SEM	19,399	0,00	*p-value* signifikan dibawah α = 5%, Model terpilih yaitu SEM-FEM

Sumber: data olahan

Tahap terakhir yaitu memilih model terbaik antara *SAR-FEM* dan *SEM-FEM* menggunakan nilai *Loglikelihood*, dimana nilai *Loglikelihood* terbesar merupakan model terbaik. Berdasarkan nilai *Loglikelihood*, model *SAR-FEM* merupakan model terbaik dengan *Loglikelihood* 96,95563.

Tabel 7
Model Regresi Panel Spasial Pengeluaran Total Per Kapita

	SAR-FEM	***SEM-FEM***
λ	0,427544 ***	
	(0,078397)	
ρ		0,588045 ***
		(0,077307)
Penduduk	-0,671686 **	-0,532307 *
	(0,206563)	(0,237264)
PDRBkap	0,334585 **	0,100708
	(0,122076)	(0,107896)
PADkap	0,190256 ***	0,244000 ***
	(0,053502)	(0,055228)
Fundkap	0,235768 **	0,504822 ***
	(0,081976)	(0,107849)
Loglikelihood	96,95563	2,675074

Keterangan: *lambda* (λ) = *spatial autoregressive coefficient, rho* (ρ) = *spatial error parameter*; Nilai dalam () = *std. error*; Tanda '***', '**', '*', dan '.' signifikansi pada *alpha* 0,1%, 1%, 5%, dan 10%.
Sumber: data olahan

Model interaksi strategis Pengeluaran Total Per Kapita Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yaitu: *Totalkap = 0,427544 W_{ij}Totalkap - 0,671686 Penduduk + 0,334585 PDRBkap + 0,190256 PADkap + 0,235768 Fundkap*

Hasil estimasi model *SAR-FEM* menunjukkan adanya interaksi pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dalam Pengeluaran Total Per Kapita. Interaksi Total Pengeluaran Per Kapita ditunjukkan dengan koefisien λ sebesar 0,427544 yang signifikan pada tingkat α = 5%. Dengan demikian dapat disimpulkan, Pengeluaran Total Per Kapita pada Pemerintah Kabupaten/Kota dipengaruhi oleh Pengeluaran Total Per Kapita Pemerintah Kabupaten/Kota tetangga sebesar 0,427544 kali. Temuan ini sejalan dengan hasil pengeluaran per kapita negara bagian Amerika Serikat dipengaruhi secara positif oleh pengeluaran tetangganya (Case et al., 1993) dan peningkatan pengeluaran publik negara bagian tetangga di India memengaruhi negara bagian lainnya (Sofi & Sasidharan, 2018). Pada lingkup Indonesia, hasil ini juga membuktikan eksistensi interaksi strategis pengeluaran pemerintah daerah di Indonesia (Husna & Yudhistira, 2017).

Interaksi strategis dalam pengeluaran pemerintah daerah menunjukkan adanya persaingan antar pemerintah daerah dalam rangka penyediaan layanan publik (Husna & Yudhistira, 2017). Persaingan antar pemerintah daerah ini dapat disebabkan adanya kebijakan pengeluaran yang lebih baik dari pemerintah daerah yang menjadi tetangganya. Sehingga pemerintah daerah akan saling termotivasi untuk melakukan pembaruan atau inovasi dalam penentuan kebijakan publik yang paling efektif dan efisien bagi masyarakatnya. Persaingan ini sekiranya juga dapat berdampak positif terhadap kuantitas dan kualitas dari pengeluaran pemerintah daerah.

Variabel Jumlah Penduduk (*Penduduk*) menunjukkan hubungan yang negatif dan

signifikan terhadap Pengeluaran Total Per Kapita. Peningkatan jumlah penduduk dapat dikaitkan dengan semakin padatnya penduduk disuatu wilayah. Koefisien yang negatif menunjukkan kemungkinan adanya skala ekonomi di wilayah yang penduduknya padat (Hanes, 2002). Relevansinya terhadap kebijakan pemerintah daerah yaitu apabila suatu kebijakan bertujuan untuk meningkatkan kepadatan penduduk maka hal tersebut akan menurunkan pengeluaran pemerintah per kapita. Sehingga pembangunan yang merata akan meningkatkan biaya pemerintah relatif terhadap pembangunaan perkotaan yang lebih padat (Bastida et al., 2013).

Variabel PDRB Per Kapita (*PDRBkap*) menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan terhadap Pengeluaran Total Per Kapita. Hal ini menunjukkan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat juga akan mengakibatkan peningkatan pengeluaran pemerintah (Hukum Wagner). Peningkatan pendapatan masyarakat berarti peningkatan potensi pendapatan pemerintah daerah yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan daerah. Selain itu, koefisien variabel PDRB Per Kapita yang lebih besar dibandingkan dengan Dana Perimbangan Per Kapita menyiratkan Pemerintah Kabupaten/Kota lebih bergantung pada sumber daya mereka sendiri sekaligus menunjukkan adanya kebebasan dalam membuat keputusan belanja publik (Sofi & Sasidharan, 2018).

Variabel Pendapatan Asli Daerah Per Kapita (*PADkap*) menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan terhadap Pengeluaran Total Per Kapita. Pendapatan per kapita pemerintah daerah mencerminkan kapasitas fiskal daerah (Yu et al., 2011). Semakin besar Pendapatan Asli Daerah, *ceteris paribus*, maka semakin besar pula alokasi pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota. Variabel Dana Perimbangan Per Kapita (*Fundkap*) menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan terhadap Pengeluaran Total Per Kapita. Hibah merupakan sumber utama pendapatan daerah (Costa et al., 2015). Semakin besar hibah yang diterima oleh pemerintah daerah, juga semakin besar dan luas pula cakupan pengeluaran yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat interaksi strategis Pengeluaran Total Per Kapita, yang berarti Pengeluaran Total Per Kapita setiap Kabupaten/Kota akan dipengaruhi oleh Pengeluaran Total Per Kapita Kabupaten/Kota yang menjadi tetangga/bersinggungan dengan daerah tersebut. Dalam model interaksi strategis ini variabel Jumlah Penduduk (Penduduk), PDRB Per Kapita (PDRBkap), PAD Per Kapita (PADkap) dan Dana Perimbangan Per Kapita (Fundkap) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pengeluaran Total Per Kapita. Kebijakan yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Daerah yaitu meningkatkan sinergitas antar daerah dalam pengambilan keputusan penganggaran dan pengeluaran daerah guna mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah maupun pembangunan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Bastida, F., Guillamón, M.-D., & Benito, B. 2013. Municipal Spending in Spain: Spatial Approach. *Journal of Urban Planning and Development*, *139*(2), 79–93.

Brueckner, J. K. 2003. Strategic interaction among governments: An overview of empirical studies. *International Regional Science Review*, *26*(2), 175–188.

Case, A. C., Rosen, H. S., & Hines, J. R. 1993. Budget Spillovers and Fiscal Policy Interdependence Evidence from the States. In *Journal of Public Economics*, 52.

Costa, H., Veiga, L. G., & Portela, M. 2015. Interactions in Local Governments' Spending Decisions: Evidence from Portugal. *Regional Studies*, *49*(9), 1441–1456.

DJPB. 2019. *Kajian Fiskal Regional Kanwil DJPB Provinsi Riau*.

Elhorst, J. P. 2014. *Spatial Econometrics From Cross-Sectional Data to Spatial Panels*. Springer Briefs in Regional Science.

Ferraresi, M., Migali, G., & Rizzo, L. 2018. Spillover effects in local public spending. *Regional Studies*, *52*(11), 1570–1584.

Firdaus, M., Irawan, T., Ahmad, F. S., Siregar, H., Siswara, D., & Jakariya, R. 2021. *Aplikasi Model Ekonometrika Dengan RStudio (Model Time-Series, Panel, Spatial)*. PT Penerbit IPB Press.

Granado, F. J. A. del, Martinez-Vazquez, J., & Simatupang, R. R. 2008. Local

Government Fiscal Competition in Developing Countries: The Case of Indonesia. *Urban Public Economics Review*, *8*, 13–45.

Hanes, N. 2002. Spatial Spillover Effects in the Swedish Local Rescue Services. *Regional Studies*, *36*(5), 531–539.

Husna, N. Al, & Yudhistira, M. H. 2017. Studi Empirik Interaksi Strategis Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 10(2).

Isyandi, B., & Trihatmoko, R. A. 2022. An Analysis of Regional Economic Performance of Riau on The Capital Expenditure Budget: A Study of Indonesian Territorial Economics. *International Journal of Public Policy and Administration Research*, *9*(2), 33–45.

Kamarni, N., Karib, A., & Yulius, Y. 2022. Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap PAD Sektor Pariwisata di Kota Pariaman Periode Tahun 2010-2020. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, *13*(2), 104.

Le Gallo, J., & Ndiaye, Y. 2021. Environmental expenditure interactions among OECD countries, 1995–2017. *Economic Modelling*, *94*, 244–255.

Lesage, J. P. 1999. *The Theory and Practice of Spatial Econometrics*. Department of Economics, University of Toledo.

López, F. A., Martínez-Ortiz, P. J., & Cegarra-Navarro, J. G. 2017. Spatial spillovers in public expenditure on a municipal level in Spain. *Annals of Regional Science*, *58*(1), 39–65.

Maulana, S. J., & Kurnia, A. S. 2014. Interaksi Strategis Belanja Pemerintah Daerah dan Yardstick Competition di Provinsi Jawa Tengah. *Prosiding Seminar Nasional Dan Siding Pleno ISEI XVII, 3-5 September*, 265–273.

Rifa'i, A., & Moddilani, G. 2021. Analisis Dampak Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan Terhadap PDB Per Kapita: Spending More or Spending Better. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, Dan Kebijakan Publik*, *6*(3), 211–226.

Sasana, H. 2011. Analisis Determinan Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat dalam Era Otonomi dan Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, *18*(1), 46–58.

Siburian, M. E. 2022. The Link Between Fiscal Decentralization and Poverty – Evidence from Indonesia. *Journal of Asian Economics*, *81*. https://doi.org/10.1016/j.asieco.2022.101493

Sjafrizal. 2017. *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi*. Rajawali Pers PT RajaGrafindo Persada.

Sofi, A. A., & Sasidharan, S. 2018. Do Indian States Mimic, Compete or Interact in Local Public Spending? A Spatial Econometric Analysis. *Asian Economic Journal*, *32*(2), 187–213.

Yu, Y., Zhang, L., Li, F., & Zheng, X. 2011. On the Determinants of Public Infrastructure Spending in Chinese Cities: A Spatial Econometric Perspective. *Social Science Journal*, *48*(3), 458–467.